BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terbentuknya negara Indonesia tidak lain memiliki suatu tujuan yang mulia yaitu mendorong dan menciptakan kesejahteraan umum dalam payung Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Tujuan atau cita-cita tersebut tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam alinea ke-4 (empat) yaitu¹ :

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia” yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan “Kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia” yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Korupsi merupakan salah satu dari sekian istilah yang kini telah akrab di telinga masyarakat Indonesia, hampir setiap media massa memberitakan berbagai kasus korupsi yang dilakukan oleh aparatur negara baik pegawai negeri ataupun pejabat negara. Dalam kepustakaan kriminologi, korupsi merupakan salah satu kejahatan jenis “*white collar crime*” atau kejahatan kerah putih.

Akrabnya istilah korupsi di kalangan masyarakat telah menunjukkan tumbuh suburnya perhatian masyarakat terhadap korupsi, “*white collar crime*” mampu menarik perhatian masyarakat karena para pelakunya adalah orang-orang yang dipersepsikan oleh masyarakat sebagai orang-orang terkenal atau cukup terpandang namun merekalah yang membuat kemelaratan dalam masyarakat².

¹Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4, Lembaga Informasi Nasional Republik Indonesia, 2010 :h. 23

² Teguh Sulista dan Aria Zurnetti, 2011, *Hukum Pidana : Horizon Baru Pasca Reformasi* Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 63.

Perlindungan terhadap segenap bangsa dan tumpah darah melalui perangkat hukum yang berlaku merupakan hal yang mutlak untuk diwujudkan, tidak ada artinya kata-kata “melindungi segenap bangsa dan tumpah darah” jika ternyata masih ada penderitaan yang dirasakan oleh rakyat berupa ketimpangan-ketimpangan hak-hak ekonomi yang mencerminkan ketidaksejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

”Ketidaksejahteraan tersebut didorong dan diciptakan oleh sistem pemerintahan yang tidak berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, karena masih membiarkan praktik-praktik pemerintahan di mana kekuasaan dijalankan secara sewenang-wenang dan tidak berpihak pada rakyat.

Perlu penjabaran lebih rinci secara hukum, “agar kewajiban konstitusional tersebut benar-benar dijalankan secara baik”, dengan menciptakan praktik-praktik pemerintahan yang terbuka, transparan dan senantiasa bertanggung jawab atas kepentingan masyarakat secara luas, yang titik akhirnya adalah kesejahteraan secara nyata bagi masyarakat luas dengan pedoman prinsip-prinsip keadilan sosial berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan hal tersebut maka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dapat pula berarti upaya keras dan nyata bagi pembebasan seluruh rakyat Indonesia dari penderitaan dan upaya yang nyata bagi terciptanya kesejahteraan rakyat Indonesia tanpa kecuali.

Untuk mewujudkan cita-cita luhur tersebut, yang berkaitan dengan manifestasi atas kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia maka lahirlah suatu “pedoman bagi Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi”, Kolusi, dan Nepotisme yang dirumuskan dalam “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi,

Kolusi, dan Nepotisme”. Dalam Undang-Undang tersebut memuat prinsip-prinsip atau asas-asas Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggaraan Negara, Kepentingan Umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, dan Akuntabilitas, yang dijabarkan dalam penjelasan Pasal 3 sebagai berikut³ :

1. “Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam negara hukum” yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara ;
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yaitu “asas yang menjadikan landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggaraan Negara”;
3. Asas Kepentingan Umum, “yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif”;
4. Asas Keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar , jujur, dan tidak diskriminatif,tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara ;
5. Asas Proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;
6. Asas Profesionalitas, yaitu asas asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

³ Tim Redaksi Cipta Media Indonesia, 2011, *Buku Undang-Undang dan Peraturan Tentang Tindak Pidana Kejahatan Korupsi*, Cipta Media Cet. 4, Jakarta, 2011.

7. Asas Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pedoman mengenai Penyelenggaraan Negara yang bersih menjadi penting dan sangat diperlukan untuk menghindari praktik-praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme tidak saja melibatkan pejabat yang bersangkutan tetapi juga oleh keluarga dan kroninya, yang jika dibiarkan maka rakyat Indonesia akan berada di posisi yang sangat merugikan.

Korupsi merupakan kejahatan yang sangat merugikan Negara, untuk itu diperlukan kerja aparat penegak hukum yang profesional. Penegakan hukum tersebut dilakukan oleh aparat yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Aparat negara yang terkait dalam pemeriksaan perkara pidana adalah aparat Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal ini fokus pada wilayah hukum Polres Wonosobo merupakan ujung tombak salah satu aparat penegak hukum yang berwenang dalam penanganan tindak pidana Korupsi, maka dibutuhkan peran lembaga Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana Korupsi agar tindak pidana Korupsi dapat diberantas dari kasus Korupsi yang terkecil sampai kasus yang besar. Sehingga kesejahteraan masyarakat terpenuhi demi peningkatan pertumbuhan ekonomi negara.

Pada kenyataan pelaksanaan tugas penyidik Polres Wonosobo dalam penanganan tindak pidana korupsi masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu hambatan yang dihadapi antara lain adanya kewenangan tumpang tindih antar penyidik Polri dan Jaksa dalam penanganan tindak pidana korupsi. Misalnya pada ketentuan Pasal 110 ayat (2) dan (3) KUHP, disebutkan bahwa dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi, selanjutnya dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.

Praktiknya jaksa penuntut umum dalam penelitian membutuhkan waktu yang lama sebelum pengembalian berkas perkara kepada penyidik yang disertai dengan petunjuk. Demikian pula setelah berkas dilengkapi oleh penyidik sesuai petunjuk penuntut umum untuk sampai pada tahap P21 juga membutuhkan waktu yang lama. Hal ini bertentangan dengan Pasal 110 ayat (4)

KUHAP yang menyatakan, bahwa penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik. Kenyataannya dalam praktik setelah 14 (empat belas) hari berkas perkara dikembalikan oleh jaksa penuntut umum untuk dilengkapi. Padahal setelah 14 (empat belas) hari tersebut berkas perkaranya seharusnya sudah dinyatakan selesai.

Selain itu penentuan kerugian Negara dalam tindak pidana korupsi menjadi permasalahan tersendiri bagi penyidik. Pada tahap ini, penyidik, memutuskan perbuatan melawan hukumnya berdasarkan fakta hukum, di antaranya tindak pidana korupsinya, menentukan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara, dan bentuk serta jumlah kerugian keuangan negara.

Selain menganalisis fakta-fakta hukum, penyidik polri juga melihat berapa besar peluang untuk memenangkan perkara di pengadilan terkait dengan kekuatan bukti dan barang bukti yang di sajikan di pengadilan, yang kemudian menjadi alat bukti bagi pertimbangan majelis hakim. Hal ini, penyidik Polri menentukan apakah Pasal yang lebih mudah menjerat tersangka, misalnya apakah tersangka akan dijerat dengan Pasal “memperkaya diri” atau Pasal “menyalahgunakan kewenangan” di Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.”Hasil akhir dari tahap pertama adalah menentukan apakah ada kerugian keuangan negara”. Hal ini terkait erat dengan tahap menghitung besarnya sebagian keuangan negara⁴.

Pihak yang bertanggung jawab menghitung kerugian keuangan negara adalah akuntan/auditor/akuntan forensik. Di Undang-Undang, pihak yang menghitung kerugian keuangan negara disebut sebagai saksi ahli, seperti yang diatur dalam : KUHAP Pasal 1 angka 28, ahli adalah “seorang yang memiliki keahlian khusus” tentang hal yang diperlukan untuk

membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, tentang Badan Pemeriksaan Keuangan Pasal 11 huruf c, ahli adalah Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) (bukan pribadi, anggota, karyawan auditor),

⁴Shartika, 2009, Tahap-Tahap Kerugian Negara, <https://shartika2009.wordpress.com/2011/04/24/tahap-tahap-kerugian-negara/>, diakses 5 Januari 2017
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 32 ayat (1), ahli adalah instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk yang menghitung jumlah kerugian negara, “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

Tahap menentukan kerugian keuangan negara dan tahap menghitung kerugian keuangan negara sangat berhubungan erat, prosesnya interaktif dan “*reiterative*”, oleh karena itu kedua tahap ini praktis berakhir bersamaan. Kedua tahap ini berlangsung terus menerus sampai penyidik Polri dan akuntan forensik siap dengan penuntutan di pengadilan. Berdasarkan bukti dan barang bukti yang dapat dihimpun sampai saat itu, mereka dapat memutuskan mengumpulkan bukti dan barang bukti tambahan, mengupayakan pemulihan kerugian keuangan negara melalui jalur hukum perdata atau hukum administratif, atau menghentikan penyelidikan/penyidikan⁵.

Setelah tahap pertama dan kedua dilaksanakan, maka penyidik membuat kesimpulan tidak terdapat cukup bukti untuk membuktikan unsur tindak pidana korupsi, atau tetapi secara nyata telah ada kerugian negara, maka penyidik menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada jaksa pengacara negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi

yang dirugikan untuk mengajukan gugatan (Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).

⁵ *Ibid*

Penjelasan “Pasal 32 ayat (1)” menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “secara nyata telah adakerugian keuangan negara” adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Didukung dengan “Pasal 32 ayat (2)” bahwa putusanbebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara⁶.

Proses penentu kerugian Negara tersebut menjadi hambatan bagi Polri dalam penanganan kasus korupsi karena Polri harus bekerja sama dengan instansi lain seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam menentukan kerugian Negara. Hal ini akan memakan waktu yang lama dalam penanganan korupsi oleh penyidik Polri karena harus menunggu hasil penentu kerugian Negara oleh instansi terkait sebagai dasar penyidika Polri menentukan ada tidaknya kerugian Negara dan berapa besar jumlahnya.

Penanganannya kasus korupsi yang terjadi di wilayah hukum Polres Wonosobo maka untuk menentukan kerugian negara kasus korupsi penyidik polri harus bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Tengah yang berkedudukan di Semarang. Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Tengah sendiri menerima permintaan penentu kerugian negara kasus korupsi dari Kepolisian se Jawa Tengah sehingga penentuan kerugian Negara Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Tengah memakan waktu lama.

⁶ *Ibid*

Akhirnya penyelesaian perkara korupsi yang ditangani oleh Polres Wonosobo juga terpengaruh oleh hal tersebut.

Akhirnya upaya penegakan hukum terhadap perkara tindak pidana korupsi belum sesuai dengan yang diharapkan. Untuk itu penelitian ini hendak membahas lebih lanjut tentang penanganan perkara tindak pidana korupsi dengan judul : Mekanisme Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Polres Wonosobo.

B. Rumusan Masalah

Untuk menunjang tugas pokok Kepolisian terutama di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi baik dari segi pengawasan maupun penindakan, Polres Wonosobo sebagai ujung tombak dalam menjabarkan program Kapolri yaitu profesional Moderen terpecaya salah satunya terkait pemberantasan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan apa yang telah tertulis di atas maka penulis mengangkat beberapa permasalahan :

1. Bagaimana penanganan tindak pidana Korupsi di Indonesia?
2. Bagaimana mekanisme penanganan perkara tindak pidana korupsi di Polres Wonosobo?
3. Apa hambatan dan solusi yang dihadapi penyidik Polres Wonosobo dalam mekanisme penanganan tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme penanganan perkara tindak pidana korupsi di Polres Wonosobo.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dan solusi yang dihadapi penyidik Polres Wonosobo dalam mekanisme penanganan tindak pidana korupsi.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti. Untuk memberikan kesatuan pemahaman terhadap judul tesis ini, maka di bawah ini akan dibahas mengenai konsep atau arti dari beberapa istilah yang digunakan dalam penulisan tesis :

Mekanisme Penanganan Perkara disebut juga peradilan. Peradilan merupakan tata cara bagaimana suatu perkara itu diperiksa dan diputuskan penyelesaiannya oleh petugas yang berwenang untuk itu, atau segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara menegakkan hukum dan keadilan. Peradilan bermacam-macam jenisnya, tergantung dari perkara yang bersangkutan, sehingga suatu perkara yang akan ditangani atau diselesaikan harus dilihat dahulu termasuk dalam lingkungan peradilan mana perkara itu.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum tertentu dilarang dan diancam dengan pidana bagi yang melanggar larangan tersebut. Sedangkan perbuatan perdata adalah perbuatan yang berhubungan dengan semua segi kehidupan manusia yang menimbulkan hak dan kewajiban seseorang atau badan hukum.

Tindak Pidana Korupsi dapat didefinisikan ke dalam 4 jenis yaitu :

1. *Discretionary corruption* adalah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi.
2. *illegal corruption* merupakan jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi tertentu.
3. *Mercenary corruption* adalah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.

4. *Ideological corruption* yaitu suatu jenis korupsi *illegal* maupun *discretionery* yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok.

Dalam *The Lexicon Webster Dictionary*, kata korupsi berarti kebususkan, kejahatan, keburukan, ketidakjujuran, dapat disuap, penyimpangan dari kesucian, tidak bermoral, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.

E. Kerangka Teoritis

Teori Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum⁷.

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut⁸ :

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. **Kaum Positivisme** lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan **Kaum Fungsionalis** mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat

menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan⁹.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu¹⁰.

⁷Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

⁸Dwika, "*Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum*", <http://hukum.kompasiana.com>. (02/04/2011), diakses pada 16 Juli 2017.

⁹Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59.

¹⁰Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23. Ajaran **kepastian hukum** ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian¹¹.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian deskriptif. Melalui penelitian deskriptif diharapkan masalah mengenai mekanisme proses penanganan tindak pidana korupsi di Polres Wonosobo dapat digambarkan secara jelas dan mendalam sehingga dapat diperoleh pemahaman yang baik dan benar. Objek penelitian adalah berkas penanganan kasus tindak pidana korupsi yang membutuhkan pembuktian yang terjadi di Polres Wonosobo.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap

peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa di sini penulis ingin melakukan pendekatan terhadap mekanisme proses penanganan tindak pidana korupsi di Polres Wonosobo.

¹¹Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm.82-83.

Dalam proses penyidikan baik dari aspek yuridis (peraturan perundang-undangan) maupun dalam aspek pelaksanaannya di masyarakat.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di wilayah Hukum Polres Wonosobo.

4. Jenis dan Sumber data

Sumber data penelitian ini meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara. Data primer penelitian ini adalah hasil wawancara dengan hakim mengenai penanganan tindak pidana korupsi oleh penyidik Polres Wonosobo.

b. Data sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui bahan keputusan. Data sekunder yaitu data yang berasal dari literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan norma-norma hukum yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan dalam penelitian. Data sekunder penelitian ini meliputi :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat atau bahan pokok. Bahan hukum primer penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, KUHAP, KUHP, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang “Tindak Pidana Suap”, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang “Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN”, Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang “Kepolisian Negara Republik Indonesia”, Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 tentang “Pemberantasan Korupsi”, Undang-Undang Anti Korupsi Korea, (*Anti-Corruption Act*) Nomor 6494, 24 Juli, 2001, Konsep KUHP 2006, Konsep KUHP 2008, RUU “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.
- 2) Bahan sekunder, yaitu sumber data pendukung berkaitan dengan permasalahan hukum yang dikaji meliputi : buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diangkat penelitian ini, jurnal, artikel ilmiah, hasil penelitian, tesis, disertasi.
- 3) Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pelengkap bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer. Bahan hukum tersier berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Adapun bahan hukum tersier penelitian ini berupa berkas penyidikan tindak pidana korupsi, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan sesuai dengan jenis dan sumber data penelitian.

a. Data Primer

Pengumpulan data primer dilakukan sebagai berikut :

1) Observasi

Sebagai peneliti lapangan, peneliti terjun langsung ke objek penelitian yaitu di Polres Wonosobo. Observasi dilakukan dengan meneliti dan menelaah dokumen berupa berkas penyidikan tindak pidana korupsi.

2) Wawancara

Wawancara pada dasarnya merupakan upaya mengenali data dan informasi dengan melakukan tanya jawab dengan responden. Adapun responden penelitian ini yaitu penyidik Polres Wonosobo.

Cara-cara bertanya dalam wawancara :

1. Menentukan topik wawancara;
2. Menentukan narasumber yaitu penyidik Polres Wonosobo;
3. Menyusun daftar pertanyaan untuk wawancara;
4. Melakukan wawancara dengan bahasa yang santun, baik, dan benar;
5. Mencatat pokok-pokok informasi berdasarkan jawaban narasumber.

b. Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan

- 1) Studi kepustakaan, yaitu “menelaah kepustakaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi secara lengkap serta untuk mendapatkan” informasi secara lengkap serta untuk menentukan tindakan yang akan diambil sebagai langkah penting dalam kegiatan ilmiah.¹⁸penulis melakukan penelaahan terhadap berbagai buku dan literatur.
- 2) Studi dokumen (bahan pustaka), yaitu merupakan alat pengumpulan data yang akan dilakukan melalui data tertulis¹². Penulis melakukan penelaahan terhadap dokumen, khususnya berkas penyidikan tindak pidana korupsi.

6. Metode Analisis Data

Terhadap suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian

¹²Soejono Soekanto.1984. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, h.21

dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang bersifat unik dan kompleks. Padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman)¹³.

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati¹⁴.

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Sedangkan metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang

Data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (library research) dan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan (field research) kemudian disusun sistematis dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu “untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan dengan menggunakan metode berfikir deduktif”, yaitu cara berfikir yang dimulai dari hal-hal

¹³ *Ibid*, h. 10.

¹⁴ Burhan Bungin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi*: (PT. Raja Grafindo Persada, 2003 Jakarta), hal. 53.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari empat (4) bab, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan dan penutup ditambah lampiran-lampiran dan daftar pustaka yang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, bab ini menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Konseptual / Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II Kajian Pustaka, bab ini membahas tentang Sistem Peradilan Pidana Penyelidikan Dan Penyidikan, Tindak Pidana Korupsi, Pengertian Mekanisme Dan Tindak Pidana Menurut Hukum Islam.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini dijelaskan mengenai Bagaimana Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Mekanisme Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Polres Wonosobo, Hambatan Dan Solusi Yang Dihadapi Penyidik Polres Wonosobo Dalam Mekanisme Penanganan Tindak Pidana Korupsi.

Bab IV Penutup, bab ini menjelaskan tentang Simpulan Dan Saran.